

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku:

- Arba, M, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2007, *Metodologi Pendekatan Kualitatif: Aktualisasi Metodologi kearah Ragam Varian Kontemporer*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Gautama, Sudargo, 1966, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya Ed. Rev., Cet. 12*, Djambatan, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Nasution, S, 2003, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cetakan Keenam, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, R, 1988, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- \_\_\_\_\_, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, 1976, *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Eresco, Bandung.

Soeroso, R, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Supramono, Gatot, 2012, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Susanto, Happy, 2008, *Pembagian Harta Gono Gini saat Terjadi Perceraian*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan.

Syahrini, Riduan, 2015, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Raja grafindo Persada, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 14, Perubahan Keempat).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

*Regeling op de Gemengde Huwelijken* (*Staatsblad* Tahun 1898 Nomor 158).

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration on Human Rights*).

Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647).

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643).

Surat Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL Tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan.

### **C. Yurisprudensi:**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 27 Oktober 2016.

### **D. Jurnal Hukum:**

Harahap, Sayaman, “Penerapan Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA tentang Kepemilikan Tanah bagi WNI dalam Perkawinan Campuran”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume IV, Nomor 3, Desember 2016.

Yuvens, Damian Agata, “Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017.

### **E. Website:**

Fitri N. Heriani, 2017, “Menerapkan Asas Keadilan dalam Konsep Hukum Kepailitan di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59bdda7fc02ad/menerapkan-asas-keadilan-dalam-konsep-hukum-kepailitan-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 7 September 2020.